

Kepentingan China Meningkatkan Intensitas Kerjasama di Kawasan Pasifik Selatan

Mulyadi Trisakti¹, M. Syaprin Zahidi²

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang Malang, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang Malang, Indonesia
mulyaditrisakti12@gmail.com

ABSTRACT

This research will discuss the interests of China in the South Pacific region. Whereas lately, China has moved massively in the Pacific region. China brought a series of cooperation programs with countries in the South Pacific region. This study uses the concept of national interests to see the phenomena in this study. This research also uses qualitative descriptive methods, with data collection techniques namely library studies such as the collection of articles, documents, and news relevant to this research. The results of this study are the authors seeing the cooperation carried out by China in the Pacific region and promoting his national policy regarding One China Policy. This policy is about Taiwan's status as part of the sovereignty of China. Soft economic assistance is a Chinese strategy so that the South Pacific region countries want to collaborate. China asked to recognize the One-China Policy for countries in the Pacific region. Countries in the South Pacific region promised to recognize the policy, evidenced by terminating diplomatic relations with Taiwan. In the end, China succeeded in distracting the support of the South Pacific region of Taiwan to China. Furthermore, emphasizes the policy of One China Policy related to the position of Taiwan in the international arena.

Keywords: China, National Interest, One China Policy, Pacific.

ABSTRAK

Pada penelitian kali ini akan membahas kepentingan China di kawasan Pasifik, dimana pada akhir-akhir ini China secara masif bergerak di kawasan Pasifik. China membawa serangkaian program-program kerjasama dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Penelitian ini menggunakan Konsep Kepentingan Nasional untuk melihat fenomena-fenomena pada penelitian ini. Tidak terlepas juga penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan seperti pengumpulan dari artikel, dokumen, berita yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini ialah penulis melihat adanya kerjasama yang dilakukan oleh China di kawasan Pasifik serta-merta untuk mempromosikan kebijakan nasionalnya mengenai *One China Policy*. Kebijakan tersebut ialah mengenai status Taiwan sebagai bagian dari kedaulatan wilayah China. Bantuan ekonomi lunak adalah strategi China agar negara-negara kawasan Pasifik mau melakukan Kerjasama. China meminta untuk mengakui terkait kebijakan *One China Policy* bagi negara-negara di kawasan Pasifik. Negara-negara di kawasan Pasifik berjanji mengakui dari kebijakan itu, dibuktikan dengan pemutusan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Pada akhirnya China berhasil mengalihkan dukungan negara-negara kawasan Pasifik atas Taiwan ke China dan semakin mempertegas dari kebijakan *One China Policy* terkait kedudukan Taiwan di dunia internasional.

Kata Kunci: China, Kepentingan Nasional, Kebijakan Satu China, Pasifik.

PENDAHULUAN

Kawasan Pasifik Selatan adalah wilayah yang terdiri dari negara-negara kepulauan dengan ukuran teritorial kecil. Negara-negara tersebut sangat rentan terhadap intervensi asing karena letak geografisnya yang sangat strategis untuk melakukan kegiatan perdagangan dan menempatkan pangkalan militer selama perang dunia berlangsung. Setelah Perang Dunia II, kawasan ini tetap menjadi medan perebutan kekuatan besar, apakah itu China, Australia, atau Amerika Serikat. Pasifik Selatan didominasi oleh negara kepulauan, termasuk Fiji, Samoa, Vanuatu, dan negara lainnya. Pasifik Selatan adalah wilayah yang terdiri dari negara-negara kepulauan dengan ukuran teritorial kecil. Negara-negara tersebut sangat rentan terhadap intervensi asing karena letak geografisnya yang sangat strategis untuk melakukan kegiatan perdagangan dan menempatkan pangkalan militer selama perang dunia berlangsung.

Hubungan diplomatik yang dibangun China di wilayah Pasifik Selatan dalam beberapa dekade terakhir terus mengalami peningkatan yang besar. Pada awalnya kehadiran China mendapat dukungan penuh dari Australia dan Amerika Serikat selaku donatur utama di wilayah Pasifik Selatan sebagai upaya penyeimbang pengaruh Uni Soviet di kawasan Pasifik Selatan. Dimana China mulai meningkatkan kerjasamanya di Pasifik Selatan secara intensif setelah Perang Dingin. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan bantuan ekonomi dari China kepada negara-negara di wilayah Pasifik Selatan yang menjalin hubungan diplomatic China.

Pendonor terbesar di kawasan Pasifik Selatan adalah Australia dan Amerika dimana China tercatat sebagai pendonor terbesar ketiga di kawasan tersebut, berupa pemberian paket bantuan untuk memperkuat dan mempererat kerja sama perdagangan, meningkatkan kemampuan pemerintah dan militer antara China dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya alam yang dilakukan China, hal ini tentunya mendapat sambutan hangat dari negara-negara Pasifik Selatan, seperti Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, Samoa dan lainnya. Selain itu, China juga menjadi destinasi kunjungan pertama pemimpin-pemimpin Negara Pasifik Selatan. Hal ini menunjukkan pemimpin negara kecil ini menaruh lebih banyak harapan kepada China dibanding Amerika Serikat (AS) dan sekutunya termasuk Australia (Shephard, 2009).

Selain adanya bantuan dan donasi yang diberikan China kepada negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan kuat negara-negara di wilayah Pasifik Selatan lebih mendekati diri ke China. Hal ini terlihat saat setelah kejadian kudeta pada tahun 2006 di Fiji, dimana China hadir dengan banyak memberikan bantuan yang mengakibatkan Fiji melihat China sebagai sosok yang lebih baik dibanding Australia. Menurut Wallis (2012) dalam Ikmal (2019), selain dalam kerja sama perdagangan, China menjadi salah satu pembeli utama dari berbagai hasil mineral yang terdapat di Fiji dan negara-negara di wilayah Pasifik Selatan lainnya.

Dari segi bisnis komersial, lokasi kawasan ini sangat potensial dan strategis. Lokasinya yang berada di beberapa benua yang otomatis menjadikannya jalur perdagangan yang ramai. Fakta ini didukung oleh pesatnya perkembangan industri dan tingkat konsumsi masyarakat Asia, Australia dan Amerika. Kemudian, pada sektor ekspor, Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor utama bagi China, Jepang dan Korea Selatan yang saat ini dinilai tinggi di berbagai sektor manufaktur. Di sisi lain, beberapa negara di Benua Amerika seperti AS, Kanada, Argentina, Brasil, Chile, Peru

dan Kuba menganggap China dan Jepang sebagai mitra ekspor utama mereka. Australia mencatat ekspor terbesar ke Amerika Serikat, Jepang, dan China. Dari sisi impor, tidak jauh berbeda dengan Jepang dan Korea Selatan menempatkan AS dan Australia sebagai sumber impor terbesar (Burhanuddin, 2015). Di sisi lain, Jepang dan China adalah importir terbesar dari banyak negara Amerika Latin, seperti Argentina, Kanada, Brasil, Meksiko, Kuba, Bolivia, Chile dan Ekuador.

Potensi geografis lainnya adalah sekitar 25.000 pulau dengan sumber daya air dan mineral yang bermanfaat, yang terbesar diantaranya bervariasi ukurannya (Encarta Ensiklopedia), dari pulau besar dan kecil, dari kepulauan Volcano, atol hingga batu kapur (Burhanuddin, 2015). Di sisi lain, kawasan Pasifik memiliki peran penting di forum-forum internasional. Diplomasi Pasifik menjadi salah satu kekuatan bagi Kawasan Pasifik itu sendiri.

Seiring waktu, fokus China di Pasifik Selatan telah tumbuh lebih kuat. Dibuktikan dengan semakin tingginya bantuan China khususnya pada bidang ekonomi yang diberikan negara China ke negara-negara yang telah memiliki diplomatik dengan mereka. China merupakan negara ketiga terbesar yang memberikan bantuan ekonomi di kawasan ini setelah Australia dan Amerika Serikat. Selain itu, China juga menawarkan berbagai paket dukungan keuangan untuk mempromosikan membangun infrastruktur dan juga pada perdagangan, memperkuat kapasitas pemerintah dan militer, serta pengembangan sumber daya alam (Dugis, 2018). Berlindung dengan kata bantuan ekonomi di kawasan Pasifik oleh China terlihat tidak memiliki keterikatan. Ketidak terikatan inilah yang menjadikan negara-negara di kawasan Pasifik yang pada umumnya memiliki pendapatan nasional rendah dan sangat membutuhkan pemasukan ekonomi dari luar, yang akhirnya mereka tertarik dalam kerjasama ini. Maka dari uraian di atas, penulis menarik rumusan masalah pada tulisan ini ialah, Bagaimana Kepentingan China melakukan kerjasama dengan Pasifik Selatan?

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, penulis merujuk beberapa literatur terdahulu untuk membantu penulis dalam artikel ini. Ada beberapa bahan rujukan yang penulis gunakan dalam uraian sebagai berikut.

Pertama, artikel dalam jurnal Burhanudin (2015) dengan judul "Dinamika Kawasan Pasifik Barat Daya Dalam Percaturan Global". Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang memberikan gambaran fenomena-fenomena yang terjadi dan relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian dimaksud ialah kawasan Pasifik Selatan terdiri dari beberapa unit politik yang memiliki nilai strategis dan sejumlah kepentingan internasional hadir di kawasan ini. Beberapa negara besar hadir pada kawasan ini untuk menanamkan pengaruh-pengaruhnya, yang mengindikasikan negara tersebut memiliki tujuan atas kepentingan negara tersebut. Negara-negara besar, seperti Australia, AS, Jepang, bahkan China hadir di kawasan ini.

Kehadiran negara-negara besar ini guna untuk melancarkan kepentingan negaranya di kawasan Pasifik Selatan ini. Berbagai cara pendekatan dilakukan agar dapat melancarkan tujuan dari negara-negara tersebut. Penulis memilih artikel ini karena membahas fenomena yang terjadi di kawasan Pasifik Selatan, dimana terdapat kesesuaian dengan artikel yang disusun oleh penulis mengenai Pasifik Selatan, penulis

melihat adanya potensi yang dimiliki Pasifik Selatan yang mengakibatkan hadirnya negara-negara besar untuk kepentingan negara tersebut khususnya negara China.

Kedua, sebuah tulisan dalam jurnal (Dewi & Dewi, 2018) dengan judul "Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok". Pada penelitian ini menggunakan konsep keamanan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data-data dari buku, artikel, laporan yang relevan. Hasil dari penelitian ini ialah Presiden China, Xi Jinping, dengan tegas kembali memperjelas dari status Taiwan melalui kebijakan *One China Policy* atau Kebijakan Satu China, Taiwan dianggap bagian dari kedaulatan China, berbagai aksi dilancarkan oleh China atas Taiwan mulai dari sektor ekonomi, keamanan, bahkan melalui manuver politik internasionalnya dengan memperkenalkan *One China Policy* di dunia internasional.

China berhasil mempertahankan *status quo* agar Taiwan tidak mengambil tindakan ekstrim dari tindakan yang ingin membebaskan diri dari China. Pada penelitian ini, menjelaskan bagaimana China mempertahankan kedaulatannya atas Taiwan melalui keamanan dan *One China Policy* secara umum di dunia internasional. Perbedaan penelitian ini dengan yang artikel yang ditulis oleh penulis adalah penerapan kebijakan *One China Policy* yang dilakukan oleh pemerintah China secara khusus di kawasan Pasifik Selatan.

Ketiga, penulis ambil dari artikel yang ditulis oleh Tamara Renee Shie. Dalam tulisannya membahas terkait kebangkitan pengaruh China dengan berbagai tawaran bantuan melalui kerja sama perdagangan, infrastruktur, pengembangan SDA kepada Fiji tahun 2007. Selain itu, menjelaskan mengenai kesempatan China untuk masuk dan bermitra dengan Fiji akibat dari pengurangan bantuan/subsidi kepada Fiji oleh negara pendonor utama mereka, yakni Australia dan Amerika Serikat di kawasan Pasifik Selatan. Adapun fokus utama dalam penelitian ini adalah bentuk upaya yang dilakukan China untuk meningkatkan pengaruhnya di Fiji (Shie, 2007).

Hadirnya China di hampir semua negara-negara Pasifik Selatan ini dijelaskan pula dalam jurnal ini, dimana menurut Tamara terdapat kepentingan China di kawasan Pasifik Selatan terkait perdagangan sumber daya alam di Fiji. Dalam penerapannya China melakukan tiga metode pendekatan, yaitu berupa kunjungan diplomasi, penguatan pengaruh melalui bantuan ekonomi dan kebijakan non-intervensi yang dilakukan oleh China di kawasan Pasifik Selatan terutama Fiji. Dalam kesimpulan artikel ini, peneliti berpendapat bahwa dengan pertumbuhan kekuatan ekonomi dan sektor strategis lain yang mencakup kawasan Pasifik Selatan berjalan lurus dengan upaya China dalam menjangkau arena global guna mendapatkan peran yang lebih penting dalam dunia internasional dan memperluas strategi militer China meskipun hal tersebut tidak secara instan, namun dilakukan secara bertahap (Shie, 2007).

Keempat, Peter J. Connolly dalam tulisannya menjelaskan bahwa teori "kebangkitan damai" dianggap tidak lagi kredibel dalam menggambarkan situasi dan pengaruh China dalam skala global. Justru karena kekuatan ekonomi, kekuatan militer dan pengaruh regionalnya, ia tidak menonjolkan diri ketika melintasi perbatasan untuk waktu yang lama. Perubahan perilaku China didasarkan pada faktor-faktor seperti upaya melindungi warga negara China dan kepentingan ekonomi di luar negeri, sehingga dapat menimbulkan gesekan dengan aktor lain. Connolly juga mengutip contoh Papua Nugini, yang menarik bagi Australia dan China, yang menyebabkan persaingan untuk

mendapatkan pengaruh di Papua Nugini. Hal yang sama berlaku untuk Australia dan China ketika mereka melihat negara-negara Pasifik Selatan. Pada saat yang sama, Stuart Firth dalam tulisan Connolly menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri yang ditempuh Australia selama ini adalah untuk kepentingan melindungi negara dan menjaga stabilitas kawasan. Keputusan seperti pengiriman pasukan selama kudeta dan sanksi pemotongan bantuan tidak lebih dari upaya Australia untuk menciptakan stabilitas dengan memantau perkembangan politik dan menjalankan demokrasi. Australia berkepentingan menjaga stabilitas yang telah terjaga di kawasan selama ini (Connolly, 2016).

Dari empat literatur yang telah dijabarkan di atas, dapat dilihat bahwa penelitian ini mempunyai sebuah kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana pelaksanaan kerjasama China dengan negara lain demi tercapainya *One China Policy*. Selain itu, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dirujuk, yaitu dalam penelitian ini lebih spesifik membahas mengenai kerjasama yang dilakukan China demi tercapainya *One China Policy* di kawasan Pasifik Selatan.

METODE PENELITIAN

Untuk bisa menjawab penelitian ini, maka peneliti memerlukan metode yang sesuai, pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dimana pada penelitian kualitatif sendiri pengukuran data bukan berdasarkan angka atau penghitungan statistik dalam menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi. Melainkan melalui pada pemaknaan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kata supaya menghasilkan penggambaran atau jawaban kepada fenomena yang akan dibahas pada suatu penelitian. Maka metode kualitatif akan menjelaskan secara terperinci dalam melakukan penjelasan, dimana informasi akan secara jelas digambarkan pada suatu penelitian (Bryman, 2015).

Pada penelitian kali ini dalam hal metodologi, peneliti akan mengelaborasi berbagai data untuk menjelaskan kepentingan China dalam melakukan kerjasama di kawasan Pasifik Selatan. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode pengumpulan data, yakni studi kepustakaan yang didapatkan dari dokumen-dokumen, artikel, laman web dan berbagai berita yang relevan. Selain itu, dilengkapi dengan kerangka teoritik yang berhubungan pada penelitian ini, dengan penyampaian data secara terperinci dan ditutup dengan kesimpulan.

KERANGKA PEMIKIRAN

KEPENTINGAN NASIONAL

Setiap negara pasti mempunyai tujuannya masing-masing. Tujuan-tujuan tersebut disebut sebagai Kepentingan Nasional. Konsep ini menjadi salah satu konsep yang paling penting dalam ilmu hubungan internasional karena negara merupakan salah satu aktor terpenting dalam melihat hubungan internasional. Konsep ini juga lebih banyak dikenal sebagai salah satu konsep dari para penganut teori Realisme. Akan tetapi, konsep Kepentingan Nasional yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari paham Liberalisme. Meskipun konsep ini lebih banyak dikenal sebagai salah satu konsep dari Teori Realisme, namun para kaum liberalis juga mengakui kepentingan memang dimiliki oleh setiap orang.

Tetapi, berbeda dengan argumen dari Teori Realisme yang mempunyai pandangan negatif tentang sifat manusia, kaum Liberalis cenderung mempunyai pandangan yang positif terhadap sifat manusia. Oleh karena itu, meskipun kaum Liberalis tetap mengakui bahwasannya setiap orang mempunyai kepentingannya masing-masing, kepentingan masing-masing individu tersebut akan dihasilkan melalui tindakan yang kolaboratif dan kooperatif. M. Finnemore mengatakan bahwa ilmu politik mempunyai fokus perhatian tentang bagaimana sebuah usaha sebuah negara untuk mencapai kepentingannya. Akan tetapi, mencapai sebuah kepentingan merupakan salah satu bagian dari politik internasional.

Sebelum sebuah negara berusaha untuk mencapai sebuah kepentingan, negara tersebut terlebih dahulu harus mengetahui apa sebenarnya kepentingan yang ingin dicapainya tersebut. Kemudian, K. J. Holsti dalam bukunya yang berjudul *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, menjelaskan bahwa untuk menentukan masa depan dari suatu negara, kepentingan digunakan oleh para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Selain itu, M. Griffiths, T. O'Callaghan, dan S. C. Roach juga mengatakan bahwa kepentingan nasional juga digunakan untuk menggambarkan dan mendukung kebijakan tertentu. Oleh karena itu, setiap negara pasti mempunyai kepentingannya masing-masing yang kemudian akan dituangkan ke dalam sebuah kebijakan luar negeri.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasanya kebijakan luar negeri merupakan sebuah cara untuk memenuhi kepentingan nasional negara tersebut. Sama seperti negara-negara lain yang ada, China tentu saja mempunyai kepentingan nasionalnya tersendiri. Kebutuhan negara merupakan tujuan dari kepentingan nasional, dengan kata lain apa yang ingin dicapai. Dalam hal ini, kepentingan nasional, keamanan (kelangsungan hidup masyarakat dan kebutuhan daerah) dan kesejahteraan, relatif stabil dan seragam diantara semua bangsa. Dua hal utama adalah kepastian (*certainty*) dan kebahagiaan.

Kepentingan nasional disamakan dengan "tujuan nasional". Hans J Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional ialah keahlian minimal negara untuk melestarikan dan melindungi dari identitas politik, budaya dan politik mereka dari intervensi negara lain. Dari gambaran tersebut, terlihat bahwa seorang pemimpin tertentu dapat membuat kebijakan tertentu kepada negara lain melalui skema perselisihan maupun kerjasama (Coulumbis & Wolfe, 1999)

Kepentingan nasional adalah manfaat yang diwujudkan negara melalui keputusan (*decision makers*) yang dibuat untuk negara asing demi pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat. Kepentingan nasional dibagi menjadi dua kategori, manfaat nyata (jangka pendek) dan berkelanjutan (jangka panjang). Dalam konteks kepentingan jangka pendek/riil, kepentingan nasional adalah kebutuhan mendesak dan kepentingan sementara dari kepentingan eksistensial suatu negara (misalnya), lain hal pada kepentingan yang panjang (kelangsungan kepentingan) adalah kepentingan nasional yang timbul dari hubungan tersebut. dengan negara lain secara berkelanjutan (sedang berlangsung). Hal ini sesuai dengan pendapat Benjamin Jowett:

"Ada keadaan yang muncul dari kebutuhan hidup yang paling esensial dan terus ada untuk kehidupan yang baik." (Negara memperoleh keberadaannya dari upaya pemenuhan keperluan dasar yang mendesak dan kemudian keberadaannya diperlukan untuk kehidupan yang lebih baik) (Jowett, 2003).

Berangkat dari interpretasi teoritis di atas, pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini untuk melihat kepentingan China dalam kerjasama dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Alasan kerjasama ini adalah kebijakan politik negara, khususnya China, yang dikenal dengan *One China Policy* atau Kebijakan Satu China. Kebijakan ini bertujuan menjaga China sebagai sebuah aturan mutlak bagi Taiwan, dimana kebijakan satu China berlaku. Presiden Xin Jin Ping menegaskan kembali kebijakan ini di kancah internasional. Terutama kehadiran China di kawasan Pasifik. Di sisi lain, China berusaha mendorong Taiwan untuk menjadi bagian dari China. Seperti yang dijelaskan Morgenthau, tingkat bunga didefinisikan sebagai target nasional. Di sini, para peneliti menemukan bahwa tujuan nasional China adalah untuk menegaskan kembali kebijakan luar negerinya, terutama kebijakan satu China atau satu China, dimana Taiwan adalah bagian dari China.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEBIJAKAN ONE CHINA POLICY

Kebijakan Satu China atau *One China Policy* digagas oleh pemerintah China pada tahun 1979 melalui kebijakan reunifikasi damai dan secara bertahap mengembangkan konsep ilmiah "Satu Negara, Dua Sistem" secara konsensus yang diprakarsai oleh Deng Xiaoping. Dalam sejarah Kebijakan Satu China, China merupakan negara yang dikenal sebagai negara besar baik secara luas teritorinya maupun jumlah penduduknya, China termasuk jajaran negara terbesar dalam Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa. China pernah dipimpin oleh tokoh nasionalis China, yaitu dalam kepemimpinan Chiang Kai Shek, dimana ia terpilih setelah kepemimpinan Chun Yat Shen berakhir. Selanjutnya, China dipimpin oleh golongan komunis, yaitu Mao Zedong yang hadir untuk menjadi pemimpin dari China saat itu, maka perang sipil tidak terhindarkan. Perang sipil terjadi karena perubahan kepemimpinan dari golongan sosialis ke kepemimpinan komunis. Pada akhirnya, kaum sosialis harus mengakui kekalahan dan kemudian pergi ke pulau Formosa untuk membangun negara mereka sendiri yang disebut Taiwan pada saat ini (Nabhila, 2017).

Sosialis yang datang ke Taiwan tidak serta merta memperbaiki situasi politik di China. Akan tetapi, hubungan diplomatik dari kedua kubu antara China dan Taiwan tetap tidak stabil. Dimulai dari perpisahan Taiwan dari China, Taiwan hanya diakui sebagai negara berdaulat oleh segelintir negara berdaulat saja, di tingkat PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, Taiwan hanya diakui sebagai suatu bagian kedaulatan China atau provinsi di China. Pemerintah China selanjutnya memberlakukan kebijakan yang disebut Kebijakan Satu China, yang menyatakan bahwa hanya ada satu China yang berdaulat. Dengan demikian, keberadaan Taiwan adalah bagian dari China dan tidak dianggap sebagai negara mapan di luar Tiongkok (Nabhila, 2017).

Presiden China, Xin Jin Ping, mengkonfirmasi konsep tersebut di panggung internasional. Pada kesempatan peringatan 70 tahun kemerdekaan Republik Rakyat China, Presiden menyatakan bahwa mereka "mematuhi secara penuh ditambah dengan setia terhadap prinsip-prinsip satu negara, dua sistem otonomi tingkat tinggi". Inilah yang digunakan China untuk merumuskan kebijakan luar negerinya agar diterima secara internasional (Perdana, 2019). China mendukung kebijakan ini di dunia internasional, termasuk kawasan Pasifik. China terus mengejar Kebijakan Satu China di kawasan

Pasifik. Salah satu cara agar China dapat mengintegrasikan tujuan kebijakannya adalah melalui perumusan rencana kerja sama di kawasan Pasifik.

SIKAP NEGARA-NEGARA PASIFIK SELATAN TERHADAP KEBIJAKAN “ONE CHINA POLICY”

Terkait sikap negara-negara Pasifik Selatan terhadap kebijakan “One China Policy”, para pemimpin negara di kawasan Pasifik Selatan menerima dan bersedia mematuhi kebijakan tersebut, dimana awalnya sempat terjadi beberapa penundaan penerimaan *One China Policy* di kawasan ini dikarenakan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan memiliki kedekatan dengan negara donor utama mereka, yaitu Amerika Serikat dan Australia. Dimana kedua negara ini sangat mempengaruhi berbagai keputusan yang diambil oleh negara-negara di Pasifik Selatan (A. Brady, 2015).

Selain itu, dapat dilihat dari sejarah awal mula China masuk ke kawasan Pasifik Selatan ini bertujuan untuk membendung pengaruh Uni Soviet usai Perang Dunia II. Tetapi seiring perkembangan zaman, China malah menjadi negara donatur ketiga terbesar dengan menerapkan *One China Policy* sebagai landasan kerjanya.

Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan melihat beberapa hal lebih dekat dengan China, misalnya setelah kudeta tahun 2006 di Fiji, Pemerintah Fiji menganggap China lebih baik daripada Australia. Dalam hal mitra dagang, China adalah pembeli berbagai produk mineral Fiji. Pada tahun 2017, impor Fiji dari China mencapai US\$385 juta, mendekati US\$402 juta dari Australia (Atlas Media, n.d.). China juga telah diakui sebagai pengamat di *Pacific Islands Forum* (PIF) dan *Melanesia Sparhard Group* (MSG), dua forum internasional negara-negara Pasifik Selatan. Sebagai negara hegemonik terbesar di kawasan Pasifik Selatan, Australia tidak hanya ikut campur dalam kegiatan domestik Fiji, tetapi juga mengirimkan ribuan pasukan ke negara-negara Pasifik Selatan termasuk Fiji untuk menghadapi kudeta di Fiji yang dianggap sebagai ancaman bagi Australia. Beberapa isu kemudian muncul, antara lain ketika Australia menuntut agar Fiji yang merupakan anggota PIF dapat menerapkan sistem pemerintahan demokrasi yang dipraktikkan oleh negara kepulauan Pasifik Selatan lainnya, mengingat hal tersebut merupakan salah satu faktor penting keanggotaan PIF (Atlas Media, n.d.).

Kebijakan luar negeri lainnya yang diadopsi oleh Australia terhadap Fiji termasuk menghentikan sebagian besar program bantuan seperti beasiswa dan pelatihan keterampilan, dan mengurangi bantuan ke Fiji sebesar 30%. Di tingkat regional, Australia telah meminta negara-negara lain di Pasifik Selatan untuk mengutuk kudeta di Fiji dan memberikan tekanan yang kuat untuk mencapai tujuan Australia yang berupaya mendirikan pemerintahan demokrasi konstitusional di Fiji. Australia juga menunjukkan kekuatannya ketika membantu Kepulauan Solomon mengatasi konflik etnis di negara tersebut. Situasi ini juga membuat beberapa negara kawasan, seperti Kepulauan Solomon dan Fiji, percaya bahwa China lebih mudah memberikan bantuan dibanding Australia dan Australia dianggap sering mencampuri urusan dalam negeri negara lain (Brown, 2012, p. 66).

Negara-negara kawasan Pasifik semenjak dilanda pandemi *covid-19* banyak membutuhkan pendanaan keuangan, dimana China sebagai negara pemberi pinjaman dana tersebut. Beberapa bank China membuat skema pinjaman terhadap negara kawasan di Pasifik, seperti negara Cook, negara berpenduduk sekitar 20.000 jiwa melakukan peralihan pinjaman ke Bank China, yaitu Bank Investasi Infrastruktur Asia

(AIIB), setelah pinjaman dari AS dan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang dimiliki Jepang dan dana hibah Selandia Baru sebagai sekutu AS gagal melakukan kesepakatan. Pinjaman dari China ini senilai US\$20 juta kepada negara Cook, Fiji juga mendapatkan sejumlah pinjaman sebesar US\$50 juta, hal ini menandai kebijakan China terkait *One China Policy* diterima dengan baik di negara kawasan Pasifik ini (Faizal, 2021). Diikuti negara Vanuatu, sebagai negara dengan populasi 300.000 jiwa, mengumumkan jika negara mereka juga menerima dana sebesar US\$12 juta dari Pemerintah China.

Ketika situasi sulit yang dialami negara kawasan Pasifik di masa pandemi *covid-19*, dimana sektor perekonomian mereka yang ditopang dari sektor pariwisata terpaksa tutup untuk mencegah persebaran penyakit tersebut. China hadir sebagai solusi dari situasi sulit yang dihadapi oleh negara-negara tersebut. Pengaruh China semakin kuat di kawasan tersebut, meskipun negara di kawasan termasuk negara wilayah kecil akan tetapi memiliki pelabuhan-pelabuhan yang strategis sebagai jalur ekspor impor yang dibutuhkan oleh China dan juga negara kawasan Pasifik Selatan memiliki andil di tingkat internasional, suara mereka diperhitungkan di forum-forum internasional (Faizal, 2021). Pada salah satu kesempatan, Presiden Kamar Dagang Kepulauan Cook, Fletcher Malvin, mengungkapkan “China sangat bersedia meminjamkan uang kepada kami pada kepulauan Pasifik di negara manapun. Meski Australia dan Selandia Baru lebih dahulu tiba di negara kami, jauh lebih mudah mendapatkan pinjaman dari China”. Hadirnya China disaat sulit ini, dianggap menjadi hal yang baik bagi negara-negara di kawasan Pasifik.

Dari paparan di atas, bahwasanya kehadiran China dengan membawa *One China Policy* di kawasan Pasifik Selatan berhasil tanpa penolakan yang keras, karena China memasuki kawasan ini melalui cara-cara persuasif yang dianggap oleh mereka tidak terlalu mencampuri urusan domestik negara kawasan Pasifik dan lebih cepat memberikan bantuan perekonomian, disbanding dengan Australia maupun Selandia Baru yang lebih terlihat mencampuri urusan domestik negara-negara kawasan Pasifik dan cukup sulit mendapatkan bantuan perekonomian.

KEPENTINGAN CHINA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN

Meskipun secara geografis kecil, daerah ini terus menarik untuk dijadikan sebagai negara mitra bagi China karena jumlah penduduk dan dari segi ekonominya. Melihat pada sejarah China bukan pemain baru di kawasan ini, pada akhir abad ke 9 dimana imigran China pertama kali berlabuh di kawasan Pasifik Selatan ini. Menurut laporan dari Crocombe bahwa bangsa tempatan, yaitu Austronesia, kedatangan para imigran China memasuki Samudra Pasifik diperkirakan sekitar 10.000 tahun yang lalu, dimana selanjutnya mereka berdatangan dan menyebar ke berbagai tempat di bagian wilayah Samudra Pasifik Selatan (Hariri, 2020). Sebaran para imigran China di negara-negara Pasifik Selatan, antara lain Vanuatu, Kepulauan Solomon, Melanesia, Kaledonia Baru, Mikronesia, Kiribati, Nauru, Tonga, dan Kepulauan Cook. Dimana beberapa leluhur bangsa China yang berlabuh di kawasan Pasifik Selatan diantaranya adalah pedagang, pekerja, pendatang dari Tionghoa. Hal tersebut mengakibatkan garis keturunan tidak lagi memiliki wilayah mereka sendiri. Namun secara resmi China juga bukan yang memiliki kuasa di kawasan Pasifik Selatan tersebut (Hariri, 2020).

Bukti kehadiran China yang semakin meningkat di kawasan Pasifik Selatan dan berbagai kegiatan diplomatiknya selama satu dekade terakhir telah memunculkan banyak asumsi, baik positif maupun negatif. Ini terlihat melalui jalinan kerjasama yang telah China lakukan di negara-negara kawasan melalui berbagai dukungan keuangan dan perdagangan sejak Perang Dingin. Hadirnya China dalam melakukan interaksi di kawasan Pasifik Selatan tidak terhenti pada perkembangan dari negara melainkan juga pada level perkotaan di kawasan ini. Ada prediksi kuat pada 1980-an, Barat telah memberi ruang bagi kehadiran China di kawasan melalui negara-negara urban tersebut dan telah menjadi faktor penstabil bagi eksistensi China dan Uni Soviet. Ada kesan bahwa peran dan kehadiran China di kawasan itu “diinginkan”. Perdana Menteri Selandia Baru, Robert Muldoon, mengatakan kepada Deng Xiaoping, “Setiap bantuan yang dapat diberikan China kepada negara-negara kepulauan Pasifik di forum, baik politik atau ekonomi, akan membantu mempertahankan stabilitas politik di Pasifik Selatan” (A.-M. Brady, 2008).

Kebangkitan China, didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat di Pasifik, telah dibuktikan, kini China sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terkuat di jajaran dunia internasional. Hal inilah yang menjadikan China memperluas pengaruhnya hingga di kawasan Pasifik Selatan dengan dilakukannya berbagai kegiatan investasi dan bantuan ekonomi dengan jumlah besar di negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Fakta ini telah menempatkan China sebagai salah satu negara pendonor bantuan ketiga terbesar setelah AS dan Australia. Untuk memperluas eksistensinya, maka China juga melakukan beberapa upaya diplomasi budaya dengan cara mendirikan jurusan ilmu hukum pada Universitas Pasifik Selatan di Ibu Kota Fiji, yaitu Suva, menyelenggarakan pertukaran pelajar dan kursus bahasa Mandarin di saluran TV lokal.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, mendirikan Institut Konfusius, yang menyebarkan penasihat, guru dan sukarelawan berbahasa Mandarin di seluruh pulau. Lebih dari 1.000 orang Samoa telah belajar bahasa Cina di Institut Konfusius Universitas Nasional Samoa (Sape, 2022). Pengaruh China yang semakin besar di Pasifik tercermin dalam jumlah besar bantuan asing yang diberikan China kepada negara-negara di kawasan yang memiliki hubungan diplomatik dengannya (Hariri, 2020). Selain menggunakan pengaruh China dalam diplomasi budaya, China juga telah meningkatkan bantuan ekonomi ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengannya. Tercatat sebagai donor terbesar ketiga setelah Australia dan Amerika Serikat, China juga menyediakan berbagai paket dukungan keuangan untuk mendukung perdagangan, membangun infrastruktur dan meningkatkan kapasitas pemerintah dan militer, serta pengembangan sumber daya alam (Dugis, 2018).

Dari berbagai cara yang dilakukan oleh China dengan bantuan-bantuan dan juga tidak mengikat ini, membuat banyak negara-negara di kawasan Pasifik Selatan berfokus pada program yang diberikan, dikarenakan negara-negara di kawasan ini pada umumnya memiliki pendapatan nasional berada di bawah rata-rata. Hal ini menjadikan China sebagai bankir baru atas pengaruh yang dilakukannya (Yang, 2009).

Kini China yang juga sebagai negara yang memberikan bantuan donor dalam jumlah yang besar. Terlihat dengan berbagai skema investasi yang dilakukan maupun bantuan. Bantuan seperti penambahan keuangan demi meningkatkan infrastruktur yang dibutuhkan bagi negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, bertemu dengan para menteri luar negeri 10 negara kepulauan Pasifik di Fiji

pada 30 Mei 2022. Pertemuan dilakukan pada kesempatan di tengah-tengah berlangsungnya pertemuan diplomatic, Wang Yi bertujuan menguatkan kerjasama keamanan terhadap negara-negara kawasan Pasifik (Firmansyah, 2022). Proposal tersebut mencakup kesepakatan lima tahun tentang kerja sama regional. Dalam kesepakatan tersebut, China akan memberikan bantuan jutaan dolar bagi kesepuluh negara tersebut, prospek Perjanjian Perdagangan Bebas China-Pasifik, kemudian akses ke pasar global China dengan pendapatan per kapita di setiap negara. Selain itu, Pemerintah Beijing juga memberikan perintah kepada para duta besarnya untuk kawasan tersebut dengan memberikan pelatihan kepada diplomat muda dan juga memberikan beasiswa sebanyak 2.500 orang dari pemerintah China kepada pemerintahan negara-negara kepulauan di kawasan Pasifik Selatan (Bunga, 2022).

Para pemimpin di Pasifik Selatan telah menerima dukungan dan investasi besar-besaran dari China. Wilayah Pasifik merupakan wilayah yang mencakup banyak negara berkembang dengan pendapatan nasional relatif rendah. Kunjungan timbal balik yang dilakukan oleh para pemimpin Pasifik Selatan ke China memperkuat pernyataan tersebut. Selain berusaha untuk lebih memperkuat hubungan baik dan keterlibatannya di kawasan Pasifik, China bertindak sebagai pengamat di PIF (Pacific Island Forum) dan di MSG (Melanesia Spearhead Group). MSG merupakan sebuah organisasi bangsa ras Melanesia yang memberikan berbagai bantuan, antara lain bantuan infrastruktur dan keamanan. Beberapa pulau di Pasifik telah berulang kali menandatangani perjanjian keamanan terpisah. Kesepakatan dicapai untuk mendirikan laboratorium sidik jari untuk melengkapi akademi pelatihan polisi China (Jaramaya, 2022). Selain itu, Tiongkok mendapatkan kesempatan untuk melatih keamanan siber lokal, kepolisian, memperluas hubungan politik, melakukan pemetaan laut yang akurat, kemudian mengakses lebih banyak sumber daya alam dari negara-negara yang telah menerima perjanjian tersebut (Bunga, 2022).

Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa China bersedia bekerja dengan negara-negara kepulauan Pasifik untuk membangun komunitas dengan masa depan bersama dan akan selalu menjadi teman baik negara-negara kepulauan Pasifik. Semua ini dilakukan untuk menjalankan kebijakan politik tunggal China di wilayah Pasifik. China akhirnya menerima dukungan di Pasifik untuk misi kerjasamanya. "Mereka dengan sepenuh hati memuji Tiongkok sebagai mitra yang baik dan teman sejati, berkomitmen pada prinsip Kebijakan Satu China dan meningkatkan hubungan dengan Tiongkok akan membantu mereka tetap berada di sisi yang benar", ungkap Xie Feng selaku Wakil Menteri Luar Negeri China dalam sebuah wawancara televisi pada 10 Juni 2022 (Yasin, 2022). Sebagian besar negara di Kepulauan Cook, Niue, Samoa dan Tonga, Polinesia dan Federasi Kiribati dan Mikronesia (FSM) menjalin hubungan diplomatik dengan China dan memisahkan diri dari Taiwan (Wirengjurit, 2022). Ini adalah tanda yang jelas dari janji negara-negara di kawasan Pasifik Selatan untuk menghormati Kebijakan Satu China. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengakui Taiwan sebagai bagian dari kedaulatan China.

China berhasil mencapai tujuan kepentingan nasional di kawasan Pasifik. Hal ini sejalan mengenai tujuan dari suatu bangsa negara berdaulat yang ingin dicapai guna memenuhi kebutuhan dasar yang diinginkan sesuai dari pemaknaan dari konsep kepentingan negara. Pada fenomena ini negara China adalah mempertegas dari kebijakannya, yaitu *One China Policy* di kawasan Pasifik Selatan. Kawasan Pasifik

Selatan sendiri terdiri dari beberapa negara berdaulat yang memiliki hak suaranya di dunia internasional. Dengan meninggalkan pengakuan Taiwan sebagai sebuah negara, maka China berhasil mencapai tujuannya di kawasan Pasifik Selatan.

KESIMPULAN

Kepentingan China dalam melakukan kerjasama di Pasifik bertujuan untuk kembali mempertegas kebijakan mengenai *One China Policy*. Dimana kebijakan *One China Policy* merupakan kepentingan bagi China mengenai kedaulatan atas Taiwan. Untuk dapat mencapai tujuan ini, maka China perlu untuk mempromosikan kebijakan ini. Hadirnya China di kawasan Pasifik merupakan strategi agar tujuan itu tercapai. Dengan membawa tawaran kerjasama untuk menarik dukungan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan mengenai *One China Policy*.

Kerjasama seperti bantuan ekonomi yang dilakukan oleh China, dengan bentuk pemberian bantuan berjumlah jutaan dolar kepada 10 negara-negara yang berada di kawasan Pasifik Selatan, yang diperuntukkan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh negara-negara tersebut. Di sisi lain, China juga memberi bantuan di sektor pendidikan dalam bentuk pemberian 2500 paket beasiswa kepada negara di kawasan Pasifik Selatan. Skema-skema kerjasama itu bertujuan untuk kepentingan China itu sendiri, dimana pada akhirnya negara-negara tersebut berjanji akan mematuhi dan mendukung dari kebijakan *One China Policy* atau Kebijakan Satu China. Hal ini dibuktikan dengan pemutusan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Pemutusan Diplomatik ini mengakibatkan hilangnya pengakuan kedaulatan bagi Taiwan oleh negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

China melalui *One China Policy* lebih merupakan bagian dari strategi global China menyiasati pluralisme global dan mendapatkan beragam peluang untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari kawasan Pasifik Selatan. Seperti yang terlihat dalam penelitian ini, cukup banyak kepentingan China dalam memutuskan untuk melakukan kerjasama di Pasifik Selatan. Selain itu, dilihat dari sejarahnya yang panjang, daerah ini juga merupakan kawasan berlabuhnya para leluhur bangsa China sehingga memiliki ikatan sejarah dengan wilayah Pasifik Selatan.

REFERENSI

- Atlas Media. (n.d.). *OEC Fiji*. Retrieved March 26, 2022, from <https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/fji/#Imports>
- Brady, A.-M. (2008). New Zealand-China Relations: Common Points and Differences. *New Zealand Journal of Asian Studies*, 10(2), 1–20. https://www.nzasia.org.nz/uploads/1/3/2/1/132180707/2_brady_3.pdf
- Brady, A. (2015, February 27). *China Matters in the South Pacific*. The China Story. <https://www.thechinastory.org/2015/02/china-matters-in-the-south-pacific/>
- Brown, C. P. (2012). Australian influence in the South Pacific. *Australian Defence Force Journal*, 189, 66–78. <https://search.informit.org/doi/pdf/10.3316/ielapa.464417992245242>
- Bryman, A. (2015). *Social Research Methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Bunga, A. (2022, May 26). *China Tawarkan Kerja Sama Luas ke Negara Pasifik, AS Kalang Kabut* (A. G. Tuwo (ed.)). Kumparan.

- <https://kumparan.com/kumparannews/china-tawarkan-kerja-sama-luas-ke-negara-pasifik-as-kalang-kabut-1y9Dv0AKH2B>
- Burhanuddin. (2015). Dinamika Kawasan Pasifik Barat Daya. *Kritis Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 143–155. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis/article/view/9/>
- Connolly, P. J. (2016). Engaging China's New Foreign Policy in the South Pacific. *Australian Journal of International Affairs*, 1–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/10357718.2016.1194805>
- Coulumbis, A. T., & Wolfe, J. H. (1999). *Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power*. Putra Abardin.
- Dewi, I. F., & Dewi, K. U. (2018). Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 1–10. <https://doi.org/10.18196/hi.72136>
- Dugis, V. M. (2018). Memahami Peningkatan Kehadiran China di Pasifik Selatan: Perspektif Realisme Strategik. *Jurnal Global & Strategis*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jgs.9.1.2015.1-18>
- Faizal, M. (2021, January 25). *Negara Pasifik Berpaling Ke China Untuk Selamatkan Ekonomi*. Sindonews. <https://ekbis.sindonews.com/read/312808/33/negara-pasifik-berpaling-ke-china-untuk-selamatkan-ekonomi-1611543662>
- Firmansyah, T. (2022, April 7). *Kesepakatan Keamanan China dan Solomon Bikin Gempar Pasifik Selatan*. Republika. <https://internasional.republika.co.id/berita/r9yeko377/kesepakatan-keamanan-china-dan-solomon-bikin-gempar-pasifik-selatan>
- Hariri, S. N. (2020). Persaingan China-Australia Dalam Perebutan Pengaruh Di Kawasan Pasifik. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 4(1), 33–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/japs.v4i1.1640>
- Ikmal, M. (2019). *Tingkat Ancaman (The Level of Threat) Tiongkok Terhadap Australia di Pasifik Selatan* [Universitas Islam Indonesia]. <http://dspace.uui.ac.id/123456789/18442>
- Jaramaya, R. (2022, May 30). *China Rangkul Negara-Negara Kepulauan Pasifik* (E. Maharani (ed.)). Republika. <https://internasional.republika.co.id/berita/rcok0c335/china-rangkul-negaranegara-kepulauan-pasifik>
- Jowett, B. (2003). *The Modern Library dalam May Rudi, Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*. Refika Aditama.
- Nabhila, A. (2017). *Hubungan Dagang Indonesia-Taiwan Dalam Konteks Kebijakan Satu China (2014-2015)* [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12247>
- Perdana, A. V. (2019, September 30). *Xi Jinping Bersumpah Tegakkan Prinsip Satu Negara Dua Sistem di Hong Kong* (A. V. Perdana (ed.)). Kompas. <https://internasional.kompas.com/read/2019/09/30/20060511/xi-jinping-bersumpah-tegakkan-prinsip-satu-negara-dua-sistem-di-hong?page=all>
- Sape, A. (2022, June 17). *Ambisi Nyata China untuk Pasifik Selatan*. Tribunnews. <https://kumpang.tribunnews.com/2022/06/17/ambisi-nyata-china-untuk-pasifik-selatan>
- Shephard, M. (2009). *Australia's Nation-Building: An Assessment of its Contribution to Regional Security in the Pacific, and a New Policy to Guide its Future* (No. 413; Working Paper). https://www.files.ethz.ch/isn/100052/wp_sdsc_413.pdf

- Shie, T. R. (2007). Rising Chinese Influence in the South Pacific: Beijings “Island Fever.” *Asian Survey*, 47(2), 307–326. <https://doi.org/https://doi.org/10.1525/as.2007.47.2.307>
- Wirengjurit, D. (2022). Api dalam Sekam. *Kompas.Id*.
- Yang, J. (2009). China in the South Pacific: hegemon on the Horizon? *The Pacific Review*, 22(2), 139–158. <https://doi.org/10.1080/09512740902815292>
- Yasin, A. (2022, June 15). *Beijing Tak Ingin Indo Pasifik Jadi Medan Perang AS vs China*. RMOL Network. <https://www.rmolnetwork.id/beijing-tak-ingin-indo-pasifik-jadi-medan-perang-as-vs-china>